

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, *INTERGOVERNMENTAL*  
REVENUE DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
*(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2009-2012)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1)  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**SRI HANIFAH**  
**98625/2009**

**PRODI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2009-2012)

Nama : Sri Hanifah  
NIM/BP : 98625/2009  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2014

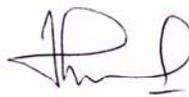
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Lili Anita SE, M.Si, Ak  
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19771123 200312 1 003

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

---

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, *INTERGOVERNMENTAL*  
REVENUE DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2009-2012)**

Nama : Sri Hanifah  
NIM/BP : 98625/2009  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2014

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Lili Anita SE, M.Si, Ak	
2. Sekretaris	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	
3. Anggota	: Vita Fitria Sari, SE, M.Si	
4. Anggota	: Halmawati, SE, M.Si	

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, *Intergovernmental Revenue* dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2009-2012)**

**Sri Hanifah**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email : s\_hanifah@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2) pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan 3) pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *total sampling* 19 kabupaten/kota sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 0,05 maka hasil penelitian ini menyimpulkan: 1) pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2) *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3) ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Saran untuk peneliti selanjutnya; 1) sebaiknya mempertimbangkan perluasan sampel, dan 2) penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain dalam penelitian.

**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Ukuran Legislatif dan , Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, *Intergovernmental Revenue* dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Lili Anita SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan juga kepada bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dorongan berbagai pihak dalam rangka penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini serta yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data selama penelitian ini.

4. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi, semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat dan seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Akuntansi BP 2009 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Mei 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teoritis .....	11
1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	11
2. Pendapatan Asli Daerah .....	20
3. <i>Intergovernmental Revenue</i> .....	24
4. Ukuran Legislatif .....	25
5. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	28
6. Hubungan Antar Variabel .....	30
B. Kerangka Konseptual .....	33
C. Hipotesis .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Populasi dan Sampel	
1. Populasi .....	36
2. Sampel .....	37
C. Jenis Dan.....	37
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik dan Pengumpulan Data .....	37

F. Variabel Penelitian .....	38
G. Pengukuran Variabel .....	38
H. Teknnik Analisi Data .....	40
1. Uji Asumsi Klasik .....	41
a. Uji Normalitas Residual .....	41
b. Uji Multi Kolenialitas .....	41
c. Uji Heterokedastisitas .....	42
d. Uji Autokorelasi .....	42
I. Analisis Data .....	43
1. Uji Kelayakan Model .....	43
a. Koefesien Determinasi ( $R^2$ ) .....	43
b. Analisis Linear Regresi Berganda .....	44
c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistic F) .....	45
d. Uji Hipotesis (t-test) .....	46
J. Definisi Operasional .....	47

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	48
B. Deskriptif Variabel Penelitian .....	51
C. Statistik Deskriptif .....	59
D. Teknik Analisis Data .....	60
1. Uji Asumsi Klasik .....	60
a. Uji Normalitas Residual .....	60
b. Uji Multi Kolenialitas .....	61
c. Uji Heterokedastisitas .....	62
d. Uji Autokorelasi .....	63
E. Analisis Data .....	64
1. Uji Kelayakan Model .....	64
a. Koefesien Determinasi ( $R^2$ ) .....	65
b. Analisis Linear Regresi Berganda .....	65
c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistic F) .....	67
d. Uji Hipotesis (t-test) .....	68

F. Pembahasan .....	70
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	70
2. Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	71
3. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Keterbatasan Penelitian .....	75
C. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Klasifikasi Nilai d .....	43
Tabel 2 Kab./Kota Sumatera Barat .....	51
Tabel 3 Efisiensi Kab./Kota Sumatera Barat Tahun 2009-2012 .....	53
Tabel 4 PAD Kab./Kota Sumatera Barat Tahun 2009-2012 .....	55
Tabel 5 <i>Intergovernmental Revenue</i> Kab./Kota Sumatera Barat .....	57
Tabel 6 Ukuran Legislatif Kab./Kota Sumatera Barat Tahun 2009-2012 .....	58
Tabel 7 Statistic Deskriptif Variabel Penelitian .....	59
Tabel 8 Hasil Uji Normalitas .....	60
Tabel 9 Hasil Uji Multi Kolonearitas .....	61
Tabel 10 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	63
Tabel 11 Uji Autokorelasi .....	64
Tabel 12 Hasil Uji Koefesien Determinasi .....	65
Tabel 13 Analisis Regresi Linerar Berganda .....	66
Tabel 14 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistic F) .....	68

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual .....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Realisasi Pendapatan Daerah menurut Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2009-2012 .....	79
Lampiran 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah menurut Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2009-2012 .....	80
Lampiran 3 Realisasi Dana Perimbangan menurut Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2009-2012 .....	81
Lampiran 4 Efisiensi Daerah menurut Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2009-2012 .....	82
Lampiran 5 Rasio PAD menurut Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2009-2012 .....	83
Lampiran 6 <i>Intergovernmental Revenue</i> menurut Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2009-2012 .....	84
Lampiran 7 Ukuran Legislatif Daerah menurut Kabupaten/Kota Sumatera Barat tahun 2009-2012 .....	85
Lampiran 8 Hasil Olahan Statistik dengan SPSS 16 .....	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Krisis ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1996 dan puncaknya pada tahun 1997 mendorong pemerintah pusat mendelegasikan sebagian wewenang untuk pengelolaan keuangan kepada daerah atau disebut dengan otonomi daerah sehingga diharapkan daerah dapat membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat yang sesuai dengan perundang-undangan (UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah). Dengan demikian otonomi daerah mampu lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Masing-masing pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan, terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah. Kewajiban tersebut dapat terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan secara optimal. Keberhasilan pengelolaan potensi daerah tersebut dapat dinilai dari kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat.

Laporan pertanggungjawaban masing-masing kepala daerah baik di provinsi, kota, maupun kabupaten sangatlah penting, apalagi dimasa reformasi

saat ini. Hal ini berdampak pada kompleksitas layanan jasa yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Kompleksitas layanan yang semakin tinggi membawa pada suatu implikasi lanjutan terhadap tuntutan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Menurut Halim (2004:24), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan sebagai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah. Selanjutnya pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah (Sesotyaningtyas, 2012). Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran, dan *intergovernmental*

*revenue*. Penelitian yang dilakukan oleh Simanullang (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah belanja modal, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rukmana (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.

Pengukuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Input adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas, dan output adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Penyebut atau input sekunder seringkali diukur dalam bentuk satuan mata uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun fisik (Mardiasmo, 2009). Rasio efisiensi kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006). Alokasi biaya ditransformasikan ke rasio efisiensi. Pada penelitian ini faktor-faktor kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, *intergovernmental revenue* dan ukuran legislatif.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, pendapatan daerah berasal dari dua sumber yaitu: pendapatan asli daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Mahmudi (2007: 128) menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah pendapatan daerah, semakin besar dana yang tersedia bagi

pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah bersangkutan mampu menyediakan pelayanan jasa pada masyarakat yang lebih baik.

Dalam penelitian ini salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah dengan alasan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang benar-benar berasal dari kemampuan pemerintah daerah sehingga memberi gambaran tentang kekuatan dan kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan dana bagi pembangunan di daerah bersangkutan. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah (Halim, 2004:67). Simanullang (2013) meneliti pendapatan asli daerah sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan terbukti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jumlah pendapatan asli daerah diperoleh dari laporan realisasi anggaran suatu pemerintah daerah. Variabel ini diukur dengan nilai atas jumlah pendapatan asli daerah yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah dibanding dengan total anggaran pendapatan asli daerah.

*Intergovernmental revenue* adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. Transfer tersebut lebih dikenal di Indonesia sebagai dana perimbangan (Suhardjanto et al., 2010 dalam Sumarjo, 2010). Selain PAD, dana perimbangan juga merupakan

salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

*Intergovernmental revenue* diukur dengan proksi perolehan total dana perimbangan dari pemerintah pusat kemudian dibagi total pendapatan. Sumarjo (2010) menggunakan *intergovernmental revenue* sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan semakin besar *intergovernmental revenue* maka kinerja yang dimiliki suatu pemerintah daerah akan semakin baik, karena dengan demikian pelayanan terhadap masyarakat akan semakin terpenuhi.

DPRD mempunyai fungsi strategis dalam pembuatan kebijakan di daerah, legislasi, penganggaran, pengawasan dan representasi. Dalam fungsi pengawasan, dewan perwakilan rakyat (DPRD) atau anggota legislatif bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil maka dapat

dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik. Banyaknya jumlah anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui pengawasan. Ukuran legislatif dalam penelitian ini diprosikan dengan jumlah total anggota DPRD.

Fenomenanya sesuai hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012. Adapun pemeriksaan terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 LKPD, opini WDP atas 267 LKPD, opini TW atas 4 LKPD, dan opini TMP atas 31 LKPD. Terhadap LK BP Batam dan 4 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP. Hal ini memperlihatkan masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah, karena masih banyak LKPD yang memperoleh opini WDP dibanding LKPD yang memperoleh WTP (BPK RI, 2013). Hal ini salah satunya disebabkan oleh tidak efisiennya belanja pemerintah daerah yaitu penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar dan tinggi dari yang seharusnya.

Disamping itu, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Penelitian Kusumawardani (2012) peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dan secara parsial menunjukkan bahwa

variabel *size* dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sedangkan kemakmuran dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menjelaskan mengenai ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah menunjukkan hasil bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemakmuran (*wealth*) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif atau dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam penelitian ini dinyatakan tidak terpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lainnya, dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) dengan judul pengaruh *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue* dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan pengujian secara simultan menunjukkan variabel-variabel independen, *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, dan pendapatan pajak daerah, secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi. Sedangkan secara parsial, variabel *leverage*, ukuran legislatif dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Sedangkan variabel pendapatan pajak daerah berpengaruh

negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Selanjutnya penelitian Wenny (2012) dengan judul analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, penelitian oleh Simanullang (2013) dengan judul penelitian pengaruh belanja modal, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008–2012. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam

pelayanan publik yang lebih baik. Bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. Dengan adanya pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan suatu informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil yang diperoleh dan berdasarkan fenomena serta perbedaan hasil dari penelitian terdahulu mendorong penulis untuk kembali meneliti dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, *Intergovernmental Revenue* dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang diambil adalah:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti, hasil-hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal pengaruh pendapatan asli daerah, *intergovernmental revenue* dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya dan bagi pihak masyarakat penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun para *stakeholder* untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.
3. Bagi pembaca, untuk dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya lainnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

###### **a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain (Nordiawan, 2009:151). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Untuk kasus akuntansi pemerintah di Indonesia seperti yang telah diatur dalam PP 24 tahun 2005, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Bastian (2010) jenis laporan keuangan sektor publik yang minimal dan terintegrasi, meliputi:

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya .

b) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang dan modal pemilik selama suatu periode tertentu. Secara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan:

- (1) Properti, pabrik, dan peralatan
- (2) Aktiva tidak berwujud

- (3) Aktiva keuangan (selain butir d, f, dan h)
- (4) Investasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas
- (5) Persediaan
- (6) Pemulihan transaksi nonpertukaran, termasuk pajak dan transfer
- (7) Piutang dari transaksi pertukaran

c) Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)

laporan kinerja keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut:

- (1) Pendapatan dari aktivitas operasi
- (2) Surplus atau defisit dari aktivitas operasi
- (3) Biaya Keuangan (biaya pinjaman)
- (4) Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan *joint venture* yang menggunakan metode ekuitas
- (5) Surplus atau defisit dari aktivitas biasa
- (6) Pos-pos luar biasa
- (7) Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto
- (8) Surplus atau defisit neto untuk periode.

d) Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto

Laporan perubahan aktiva/ekuitas secara keseluruhan menyajikan total surplus/defisit neto selama suatu periode. Pendapatan dan biaya lainnya diakui secara langsung sebagai perubahan aktiva atau ekuitas neto dari setiap

kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Laporan perubahan aktiva/ ekuitas neto ini meliputi:

- (1) Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
- (2) Saldo akumulasi surplus dan defisit pada awal periode, pada tanggal pelaporan, dan pergerakan selama periode.
- (3) Pengungkapan komponen aset/ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen aset/ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.

e) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan kegiatan investasi. Informasi arus kas menyediakan dasar estimasi kemampuan entitas kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.

f) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos pelaporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan.

Peranan pelaporan keuangan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan paragraf 21 dan 22 (PP No. 24/2005) menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan *good governance*. Hal ini dikarenakan melalui laporan keuangan maka unsur akuntabilitas dalam mencapai *good governance* dapat terpenuhi. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu: (Mahmudi, 2007:2)

- 1) Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah dan secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- 2) Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal, yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan

tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut Mahmudi (2007:4) secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah:

- 1) Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
- 2) Untuk alat akuntabilitas publik.
- 3) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

#### **b. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Munculnya TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan Indonesia” merupakan suatu wujud pengembangan bangsa dan negara Indonesia yang menginginkan perubahan kinerja dalam proses kemajuan bangsa dan negara kearah yang lebih baik. TAP MPR tersebut merupakan landasan hukum peraturan otonomi daerah dalam UU No.22/1999 dan diperbaruhi dengan UU No.32/2004. Munculnya pelimpahan kewenangan dari pusat terhadap daerah atau yang disebut otonomi daerah itu sendiri dalam kontek kinerja pemerintah memberikan dua sisi yang berbeda dimana sisi pertama adalah pemerintah memiliki kewenangan yang begitu luas atas daerahnya sedangkan disisi lainnya kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan mendapat tugas berat yang mengikuti aturan otonomi daerah tersebut yaitu tingginya transparansi dan akuntabilitas yang dituntut oleh masyarakat dari seluruh kinerja pemerintah

daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi sorotan publik, hal ini mendukung dengan pernyataan Mardiasmo (2009:121) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik lebih baik.

Menurut Nordiawan (2010:158) pengukuran kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk menilai hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002:121) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memnuhi maksud berikut:

- a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
- b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2002:122):

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati,
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dengan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

Penilaian laporan kinerja keuangan diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah: ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Penghitungan rasio efisiensi didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumarjo (2010). Penilaian efisiensi sangat penting dilakukan karena akan berdampak pada standar hidup masyarakat (Lorenzo dan Sanchez, 2007 dalam Hendro, 2010) dan hal ini dikarenakan kurangnya pendapatan sebagai gambaran akan kinerja keuangan pemerintah daerah saat ini (Hassanudin, 2009 dalam Sumarjo, 2010). Suatu

kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) maksimal dengan menggunakan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal (Hamzah, 2008 dalam Sumarjo, 2010). Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan kualitas akan pengambilan keputusan sehingga bila keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

*Government Accounting Standard Board (GASB)*, dalam *Concept Statements No. 2*, mengungkapkan bahwa terdapat tiga kategori indikator dalam mengukur kinerja, yaitu (1) *service efforts*, (2) *service accomplishment*, dan (3) hubungan *efforts* dengan *accomplishment*. Penelitian Perwitasari (2010) menjelaskan bahwa *service efforts* adalah bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang beragam. Lebih lanjut, *service accomplishment* diartikan sebagai prestasi dari program tertentu (Perwitasari, 2010). Berdasarkan GASB (1994) bahwa penilaian efisiensi pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara *service efforts* dengan *service accomplishment*.

Penelitian yang dilakukan Sardjiarto (2000) mendefinisikan *efforts* atau usaha sebagai jumlah sumber daya keuangan dan *non-keuangan*, dinyatakan dalam uang atau satuan lainnya, yang dipakai dalam pelaksanaan suatu program atau jasa pelayanan. Pengukuran *service efforts* meliputi pemakaian rasio yang membandingkan sumber daya keuangan dan *non-keuangan* dengan ukuran lain yang menunjukkan permintaan potensial atas jasa yang diberikan (Perwitasari, 2010 dalam Sumarjo, 2010). Penelitian yang dilakukan Sardjiarto (2000)

mengungkapkan bahwa ukuran *accomplishment* atau prestasi yaitu *outputs* dan *outcomes*. *Outputs* mengukur hanya sebatas kuantitas jasa yang disediakan, atau lebih dari itu, mengukur kuantitas jasa yang disediakan yang memenuhi standar kualitas tertentu. Sedangkan, *outcomes* mengukur hasil yang muncul dari penyediaan *output* tersebut. Pengukuran *outcomes* menjadi bermakna jika dalam penggunaannya dibandingkan dengan *outcomes* tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran efisiensi dengan cara membandingkan antara *efforts* dengan *outputs* dapat memberikan informasi berupa sejauh mana hasil yang didapatkan sehubungan dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang dipakai (Sardjiarto, 2000). Disamping itu, para pengguna laporan keuangan diberikan pula *explanatory information* atau berbagai macam informasi yang relevan dan berkaitan dengan layanan yang diberikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah, yang dikelompokkan dalam dua elemen yaitu: elemen di luar kontrol pemerintah seperti kondisi demografi dan lingkungan dan elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara signifikan seperti pola dan komposisi personalia. Kedua elemen tersebut dapat dianalogikan sebagai elemen-elemen yang terangkum dalam karakteristik pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pengukuran kinerja perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. pendapatan asli daerah dipisahkan

menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah (Halim, 2004:67).

Menurut Mardiasmo (2002), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi yang baik di daerahnya masing-masing, guna meningkatkan pendapatannya.

Klasifikasi PAD menurut Yani (2002) adalah :

**a. Pajak Daerah.**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi Kabupaten/Kota adalah:

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.

- 2) Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah kabupaten /kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
- 5) Potensinya memadai.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- 7) Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

**b. Retribusi Daerah.**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemebrian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 3) Bagian laba atau penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

**d. Lain-lain PAD yang Sah**

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.

13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

### **3. *Intergovernmental Revenue***

Menurut UU No. 33/2004 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat di era otonomi daerah.

Sumber dana perimbangan, yaitu:

- a. Dana Bagi Hasil, terdiri atas;
  - 1) Bagian daerah dari pemerintah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - 2) Bagian daerah dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - 3) Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas-batas arahan pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah. Contohnya, bantuan blok yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di daerah.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu bantuan khusus yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang sasarannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan

daerah. Contohnya, pembangunan di daerah yang berbatasan dengan negara lain.

Pada negara berkembang menunjukkan bahwa masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau disebut *intergovernmental revenue* (Kelly, 2010). Penelitian yang dilakukan Hadi, Hendri, dan Inapty (2009) mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan dengan tujuan adanya pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

#### **4. Ukuran Legislatif**

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:

- a. Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi.
- b. Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten.
- c. Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih

langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

DPRD memiliki fungsi :

- 1) Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- 2) Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- 3) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

- a. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- d. Mengusulkan:
  - 1) Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/ pemberhentian.
  - 2) Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
  - 3) Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
- e. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35-100 orang.
- b. Untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang.

Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji (Wikipedia, 2013).

## **5. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Beberapa penelitian mengenai hubungan antara beberapa variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012), peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 31,5% dan secara parsial menunjukkan bahwa variabel *size* dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sedangkan kemakmuran dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Selanjutnya penelitian Wenny (2012) dengan judul analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, penelitian oleh Simanullang (2013) dengan judul penelitian pengaruh belanja modal, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008–2012. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menjelaskan mengenai ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah menunjukkan hasil bahwa ukuran

(*size*) pemerintah daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemakmuran (*wealth*) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif atau dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam penelitian ini dinyatakan tidak terpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lainnya, dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) dengan judul pengaruh *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue* dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan pengujian secara simultan menunjukkan variabel-variabel independen, *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, dan pendapatan pajak daerah, secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi. Sedangkan secara parsial, variabel *leverage*, ukuran legislatif dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Sedangkan variabel pendapatan pajak daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

## **6. Hubungan Antar Variabel**

### **a. Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Mahmudi (2007:128) semakin tinggi jumlah pendapatan asli daerah, semakin besar dana yang tersedia bagi

pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah bersangkutan mampu menyediakan pelayanan jasa pada masyarakat yang lebih baik.

Penelitian terdahulu, Wenny (2012) dengan judul analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, penelitian oleh Simanullang (2013) dengan hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

PAD mempunyai pengaruh terhadap kemampuan pemerintah untuk menghasilkan kinerja keuangan. Semakin tinggi jumlah PAD pemerintah daerah, semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah akan mengalami kesulitan keuangan dalam pendanaan infrastruktur bagi pembangunan pemerintah daerah bersangkutan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar

PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa, jika PAD pemerintah daerah besar maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.

**b. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.**

*Intergovernmental revenue* sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, pemerintah daerah membelanjakan pendapatan transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran dan menurut undang-undang. Pemerintah pusat berharap dengan adanya transfer tersebut maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya.

Sumarjo (2010) menggunakan *intergovernmental revenue* sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan semakin besarnya *intergovernmental revenue* maka kinerja yang dimiliki suatu pemerintah daerah akan semakin baik.

**c. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.**

DPRD bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) diharapkan

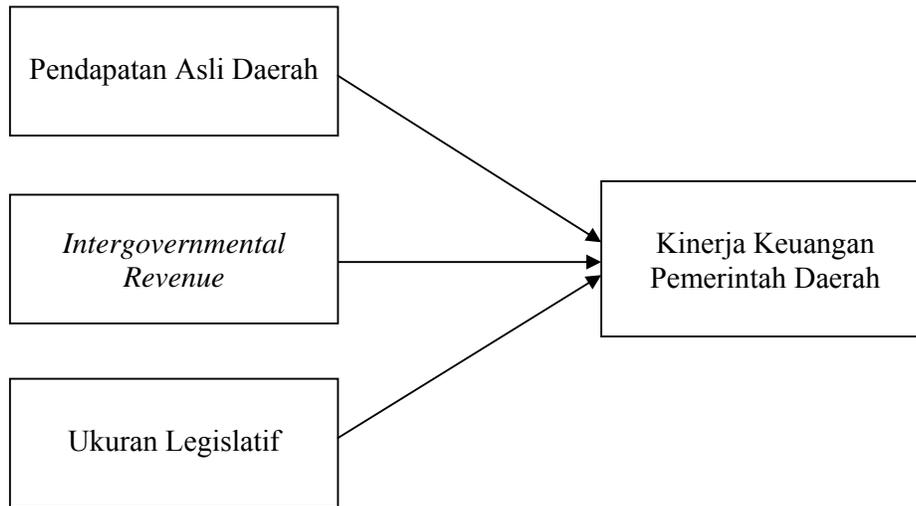
dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). Penguatan posisi dewan perwakilan rakyat (DPRD) setelah program otonomi daerah memang sesuatu yang didambakan sebagai pengontrol kinerja eksekutif (Bastian, 2006). Ikhsan dan Ishak (2005) dalam Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa kontrolabilitas (pengendalian) dianggap diinginkan karena mengeluarkan aspek-aspek kinerja. Disamping itu penelitian Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui adanya pengawasan.

## **B. Kerangka Konseptual**

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah. Dalam pengukuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD dan mampu mengelolanya dengan baik maka akan menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik. *intergovernmental revenue* adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. apabila semakin

tinggi suatu daerah menerima dana perimbangan (*intergovenrmental revenue*) maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Dewan perwakilan rakyat (DPRD) atau anggota legislatif bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Dengan semakin banyaknya jumlah anggota DPRD, diharapkan semakin efektif DPRD dalam melakukan pengawasan dan akan mendorong semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kepada landasan teori dan pengembangan hipotesis di atas maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**

### **C. Hipotesis**

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- H<sub>2</sub> : *Intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- H<sub>3</sub> : Ukuran legislatif berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah pendapatan asli daerah, *intergovernmental revenue* dan ukuran legislatif mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah periode 2009 sampai 2012. Berdasarkan pendahuluan, kajian teori dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun 2009-2012.
2. *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun 2009-2012.
3. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun 2009-2012.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Barat saja. Sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia secara keseluruhan.

2. Penelitian ini terbatas meneliti pada periode 2009-2012. Peneliti berusaha untuk meneliti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hingga periode tahun 2013 namun karena belum tersedianya LKPD tahun 2013 di BPS Sumatera Barat maka peneliti menggunakan periode tahun 2009-2012.
3. Penelitian ini terbatas hanya pada tiga faktor fundamental yaitu pendapatan asli daerah, *intergovernmental revenue*, dan ukuran legislatif dan hanya menghasilkan nilai koefisien determinasi yang sangat kecil, yaitu sebesar 12% . Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen masih sangat lemah. Sedangkan masih banyak lagi faktor fundamental yang lainnya.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah tahun pengamatan agar dapat memperlihatkan kinerja keuangan pemerintah daerah pada periode pemerintahan terbaru, serta menambah jumlah sampel yang akan diteliti sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dijadikan dasar penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah variabel lain dalam penelitian, karena selain pendapatan asli daerah, *intergovernmental revenue* dan ukuran legislatif yang telah digunakan dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa variabel lain yang diduga lebih mampu digunakan sebagai prediktor seperti *size*, belanja modal dan lain-lain.